

Besaran Zakat Fitrah di Kab. Bekasi Rp45.000

CIKARANG (IM) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan besaran nominal zakat fitrah pada Ramadhan 1445 Hijriah di daerah itu berdasarkan hasil konversi harga 2,5 kilogram beras senilai Rp45.000.

Ketua Baznas Kabupaten Bekasi, Syamsul Bahri mengatakan penetapan zakat fitrah dalam bentuk uang itu melalui musyawarah bersama melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bekasi, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, serta Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi.

"Kami sepakat menetapkan harga beras untuk zakat fitrah pada Ramadhan tahun ini sebesar Rp45.000, setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras," katanya di Cikarang, Sabtu.

Dia menyatakan penetapan nominal rupiah besaran zakat fitrah di wilayah Kabupaten Bekasi itu juga mengacu keputusan Baznas RI tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Ia menjelaskan zakat fitrah dapat dikelola oleh Badan Amil Zakat maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baznas. Zakat fitrah ditunaikan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

"Penerima manfaat zakat fitrah hanya asnaf zakat yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 60 yakni fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu sabil," ucapnya. ● pra

Volume Sampah di Kota Bandung Meningkat Saat Ramadhan

BANDUNG (IM) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Dudy Prayudi membenarkan, produksi sampah di bulan Ramadhan kerap meningkat.

Menurut ia, kondisi tersebut hampir terjadi dalam setiap tahunnya. Hal itu, disebabkan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat di bulan puasa. Paling ketara adalah produksi sampah makanan.

"Konsumsi masyarakat di bulan puasa meningkat, sehingga otomatis sampah makanan pun meningkat. Untuk presentasinya, belum kita hitung. Kita tunggu rekam untuk pastinya," kata Dudy Prayudi, kemarin.

Berkaca dengan situasi darurat sampah yang sempat melanda Kota Bandung, ia menuturkannya bahwa penanganan sampah di bulan Ramadhan tahun ini akan lebih mudah dikendalikan.

Pasalnya, masyarakat saat ini sudah mulai bergerak bagaimana mengelola sampah dari rumah. Baik itu dengan cara magotisasi, maupun

mengolah sampah menjadi kompos daur ulang.

"Ya, yang jelas kita kan sudah belajar dari pengalaman kemarin pasca daur ulang sampah, di mana masyarakat sudah mulai mengolah sampah. Apa yang dikerjakan masyarakat, membantu kita untuk mengatasi persoalan sampah," ucapnya.

Dudy menambahkan, di setiap kelurahan pun. Kini telah hadir rumah maggot yang dimanfaatkan dalam mengelola sampah. Khususnya sampah-sampah berjenis organik. Pihaknya menargetkan pengolahan sampah di setiap kelurahan, mampu mengolah satu ton sampah per hari. Sampah tersebut berjenis sampah organik yang bisa dikelola di rumah maggot.

"Ini belum mencapai. Sehingga masih ada peluang untuk meningkatkan kapasitas rumah maggotnya menjadi 1 ton per hari. Rata-rata saat ini, kebanyakan baru sekitar 500 kiloan," ujar dia. ● pra

Pemkab Karawang Libatkan Eks Bupati Banyumas dalam Pengelolaan Sampah

KARAWANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Karawang melibatkan mantan Bupati Banyumas, Achmad Husein untuk berbagi pengalaman mengelola sampah yang baik di tempat pembuangan akhir (TPA) Jalupang agar menjadi lebih ekonomis.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh di Karawang, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengunjungi Banyumas untuk belajar pengelolaan sampah agar bernilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Ia menyebutkan, Banyumas menjadi kabupaten dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Menurut dia, kehadiran mantan Bupati Banyumas itu untuk berbagi pengalaman dalam memilih sampah dengan menggunakan teknologi mesin sehingga sampah bisa diolah menghasilkan paving, atap, bata, pupuk kompos serta biji plastik yang memiliki nilai ekonomi.

Aep mengakui ketertarikannya untuk mengadopsi metode pengelolaan sampah yang sama seperti di Banyumas. Selain itu ia juga menginginkan ada gambaran terkait nilai investasi yang harus disiapkan pemerintah untuk memuluskan program pengelolaan sampah di Karawang. "Insha Allah nanti kita akan memanfaatkan sampah di TPA Jalupang agar menjadi lebih ekonomis. Sehingga bisa membantu perekonomian warga setempat," katanya.

Disebutkan bahwa di Banyumas penyediaan hanggar atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse and Recycle (TPS3R) menjadi salah satu langkah pengelolaan sampah yang sukses. Di setiap hanggar disediakan mesin pemilah sampah manual dan mesin pencuci sampah plastik.

Melalui alat-alat tersebut, katanya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola sampah akan mendapatkan penghasilan. ● pra

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 125 dan 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya ("UUPT"), PT ALAM GLOBAL MULIA, berkedudukan di Jl. Kp. Melayu Besar No. 1A, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatiwangi, Jakarta Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan dan ringkasan rancangan pengambilalihan, sebagai berikut:

1. **Peserta Pengambilalihan:** Pihak yang mengambilalih Perseroan adalah calon pemegang saham baru.
2. **Latar Belakang dan Alasan Pengambilalihan:** Pihak yang mengambilalih Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan, dengan cara pengambilan saham di Perseroan dari pemegang saham lain di Perseroan dan/atau pengambilan sejumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada Pihak yang mengambilalih Perseroan.
3. **Tata Cara Pengambilalihan:** Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.
4. **Penyelesaian Status Karyawan yang Tidak Setuju atau Keberatan dengan Rencana Pengambilalihan:** Sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan di bidang ketenagakerjaan.
5. **Penyelesaian Hak-hak Pemegang Saham dan/atau Kreditor yang Tidak Setuju atau Keberatan dengan Rencana Pengambilalihan:** Sesuai dengan ketentuan UUPT.
6. **Jangka Waktu Pengambilalihan:** Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pengambilalihan tersebut, dapat mengajukan permintaan rancangan pengambilalihan dan/atau keberatannya secara tertulis kepada Perseroan disertai dengan alasan dan bukti yang cukup, paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 18 Maret 2024
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 125 dan 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya ("UUPT"), PT ALAM GLOBAL MULIA, berkedudukan di Jl. Ciriangan No. 3, Kel. Rawasari, Kec. Jatiwangi, Jakarta Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan dan ringkasan rancangan pengambilalihan, sebagai berikut:

1. **Peserta Pengambilalihan:** Pihak yang mengambilalih Perseroan adalah calon pemegang saham baru.
2. **Latar Belakang dan Alasan Pengambilalihan:** Pihak yang mengambilalih Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan, dengan cara pengambilan saham di Perseroan dari pemegang saham lain di Perseroan dan/atau pengambilan sejumlah saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan kepada Pihak yang mengambilalih Perseroan.
3. **Tata Cara Pengambilalihan:** Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.
4. **Penyelesaian Status Karyawan yang Tidak Setuju atau Keberatan dengan Rencana Pengambilalihan:** Sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan di bidang ketenagakerjaan.
5. **Penyelesaian Hak-hak Pemegang Saham dan/atau Kreditor yang Tidak Setuju atau Keberatan dengan Rencana Pengambilalihan:** Sesuai dengan ketentuan UUPT.
6. **Jangka Waktu Pengambilalihan:** Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan UUPT.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pengambilalihan tersebut, dapat mengajukan permintaan rancangan pengambilalihan dan/atau keberatannya secara tertulis kepada Perseroan disertai dengan alasan dan bukti yang cukup, paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 18 Maret 2024
Direksi Perseroan

8 | Nusantara



WISATA MASJID AL-MUNAWAR TERNATE DI BULAN RAMADHAN

Foto udara Masjid Raya Al-Munawar di Ternate, Maluku Utara, Minggu (17/3). Masjid yang menjulang di atas permukaan air laut itu memiliki luas 9.512 meter yang diresmikan pada tahun 2010 dengan kapasitas 15 ribu jamaah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berwisata religi selama bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Mulyadi Pastikan Revitalisasi Jalan Parung Panjang Segera Dilakukan

Kementerian PUPR pada April atau pasca Hari Raya Idul Fitri akan melakukan intervensi pembangunan atau peningkatan Jalan Mohamad Toha dan Jalan Parung Panjang-Bunar atau Lebak Wangi. Jalan yang berada di kewenangan Pemprov Jawa Barat tersebut akan diintervensi berdasarkan instruksi presiden (Inpres)

CIBINONG (IM) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipastikan melakukan intervensi revitalisasi pembangunan Jalan Mohamad Toha dan Jalan Parung Panjang pasca Lebaran tahun ini.

Anggota Komisi V DPR, Mulyadi mengatakan, revitalisasi itu dipastikan akan dilakukan usai Kementerian

PUPR dan Komisi V DPR melakukan kunjungan spesifik ke Jalan Parung Panjang akhir pekan kemarin.

Mulyadi mengatakan, Kementerian PUPR menyediakan anggaran Rp90 miliar untuk memperbaiki Jalan Parungpanjang yang rusak di Kabupaten Bogor tersebut.

"Kementerian PUPR pada April atau pasca Hari

Raya Idul Fitri akan melakukan intervensi pembangunan atau peningkatan Jalan Mohamad Toha dan Jalan Parung Panjang-Bunar atau Lebak Wangi," kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu (17/3).

Menurutnya, jalan yang berada di kewenangan Pemprov Jawa Barat tersebut akan diintervensi berdasarkan instruksi presiden (Inpres) Jalan Daerah dan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

"Revitalisasi dua ruas jalan di Parung Panjang ini dibagi kedalam dua paket. Paket ke-satu, 2,9 kilometer dan paket kedua 3,1 kilometer," ujar Mulyadi.

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan bahwa kunjungan Komisi V DPR dan Kementerian PUPR ke Parungpanjang itu merupakan

lanjutan dari audiensi masyarakat Parung Panjang yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

"Kami sudah melakukan peninjauan jalan dan pertemuan dengan stakeholder terkait termasuk Bupati Bogor, jajarannya dan Dinas ESDM Jawa Barat. Semoga ada solusi cepat dalam mengatasi kekesruhan terkait operasional atau lalu lintas truk khusus tambang yang menggunakan jalan provinsi ini," jelas Mulyadi.

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan berkaitan dengan penanganan infrastruktur dan transportasi wilayah Kecamatan Parung Panjang, beberapa langkah kongkret sudah dilakukan.

"Pertama adanya Peraturan Bupati Nomor 56

Tahun 2023 Tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang, pembangunan dan operasional sementara kantong parkir truk tambang yang berlaku sejak akhir Desember 2023, serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Transporter Angkutan khusus Tambang," ungkap Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu menambahkan untuk solusi permanen yang mungkin juga sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor adalah diperlukannya jalan tol khusus tambang.

"Ini sebenarnya sudah mulai berproses nanti mungkin kami melihat sudah sejauh mana progresnya" tambahny. ● gio

Razia THM di Bogor, Puluhan Wanita Penghibur Terjaring

BOGOR (IM) - Aparat gabungan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor bersama TNI/Polri menggelar razia ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam (THM) di Bogor Minggu (17/3) dini hari. Hasilnya, puluhan wanita penghibur terjaring dalam razia ini dan juga menyita ribuan botol miras dari sejumlah titik.

Razia aparat gabungan ini digelar untuk menghormati bulan Ramadhan.

Sejumlah lokasi THM di

wilayah Kecamatan Sukaraja dan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini nekat membuka usahanya pada akhir pekan ini. Padahal Pemkab Bogor sudah menyatakan selama bulan Ramadhan lokasi hiburan ini seharusnya ditutup.

Namun, belum genap sepekan puasa sejumlah lokasi hiburan malam ini sudah nekat kembali beroperasi.

Lokasi THM seperti panti pijat dan karaoke mini ini langsung ditutup petugas,

sementara pemiliknya harus menjalani proses pendataan perizinan. Puluhan wanita penghibur pun langsung diminta pulang dan tidak kembali bekerja selama Ramadan ini.

Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Tibum) Satpol PP Kabupaten Bogor, Ramai Kodara menegaskan razia ini digelar aparat gabungan setelah mendapat laporan keluhan warga yang merasa terganggu dengan aktivitas THM tersebut.

"Kita aparat gabungan

menggelar razia ini merespons keluhan warga, bahwa banyak THM yang kembali beroperasi selama Ramadan ini," ungkap Ramai.

Ramai mengungkapkan, sebenarnya selama Ramadan ini tempat hiburan harus tutup sesuai surat edaran dari Pemkab Bogor. Pada awal Ramadan sejumlah THM memang menutup usahanya, tetapi hal ini tidak berlangsung lama.

"Kalau sekarang ini ada yang kembali mulai buka, jadi

kita razia," lanjutnya.

Selain merazia THM, aparat juga menggerebek sejumlah lokasi penjualan miras di kawasan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. di lokasi ini aparat menyita ribuan botol miras dari berbagai merek. "Untuk miras kita sita semuanya dan pemiliknya diminta menunjukkan surat izin perdagangan. Saya yakin mereka tidak ada surat izinnnya," lanjut Ramai. ● gio

Pj. Bupati Bogor dan Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Parung Panjang

BOGOR (IM) - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mendampingi Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Parung Panjang dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi wilayah Kecamatan Parung Panjang, Jumat (15/3).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan peninjauan ini berkaitan dengan penanganan infrastruktur dan transportasi wilayah Kecamatan Parung Panjang, dan beberapa langkah kongkret sudah dilakukan.

Pertama adanya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Jam Operasional Angkutan Tambang, pembangunan dan operasional sementara kantong parkir truk tambang yang berlaku sejak akhir Desember 2023, serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Transporter Angkutan khusus Tambang.

Lanjut Asmawa Tosepu, untuk solusi permanen yang mungkin juga sudah menjadi konsen oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah diperlukannya jalan tol khusus tambang.

"Ini sebenarnya sudah

mulai berproses nanti mungkin kami melihat beberapa para teman-teman sesuai tusinya," ungkapnya.

Kata Pj. Bupati Bogor, sebenarnya sudah ada tiga skenario yang pertama, jalan tol tambang ini dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.

Kedua menggunakan BUMD Jawa Barat bahkan ini sudah lebih maju karena skenario yang kedua adalah mekanisme pembiayaan dari BUMD Provinsi Jawa Barat dan itu juga sudah agak maju karena sudah punya DED. Lalu ketiga skenarionya adalah dibangun oleh investasi murni.

"Untuk kantong parkir yang disiapkan oleh pemerintah saat ini paling lambat bulan ini harus selesai. Sudah kami sampaikan ke para camat untuk mulai disosialisasikan. Pada saat beroperasinya kantong parkir yang disiapkan oleh pemerintah, maka kantong parkir yang disiapkan oleh masyarakat sudah tidak diperlukan lagi," bebnyanya.

Ia juga berharap pertemuan ini jadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI untuk percepatan pembangunan jalan tambang ini.

Selanjutnya, Ketua Komisi



Pj Bupati Bogor saat menerima kunjungan kerja DPR RI Komisi V soal infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

si V DPR RI, Muhammad Iqbal mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan langsung infrastruktur dan transportasi wilayah Kecamatan Parung Panjang kondisinya rusak dan sebagian besar kerusakannya disebabkan oleh truk pengangkutan tambang.

Menurutnya, ada dua solusi yang bisa dilakukan yakni, pertama solusi jangka pendek dengan meminta secepatnya Pemerintah Pusat untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak tadi.

Sementara untuk solusi jangka panjangnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pj. Bupati Bogor, harus ada jalan

khusus truk tambang. Saat ini sedang tahap pembahasan DED dan ijin amdalnya.

Disampaikan oleh Pak Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, bahwasanya untuk tahun ini akan dilakukan perbaikan jalan sepanjang 6 kilometer melalui interest jalan daerah. Nah bagaimana sisanya yang 4 kilometer ini kita harap secepatnya akan bisa diteruskan," tuturnya.

Ia juga meminta kepada Pj. Bupati Bogor agar secepatnya DED dan ijin amdalnya segera diselesaikan, hingga nanti bisa diajukan anggarannya ke Pemerintah Pusat. Jadi kalau sudah terealisasi jalan

khusus mobil tambang, maka mobil tambang tidak melewati jalan ruas saat ini, itu solusi jangka panjang," jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Budiamin bersama jajaran, Perwakilan ESDM Provinsi Jawa Barat, Asisten Perencanaan dan Pembangunan, Kepala Disdukcapil, Kepala Bappedalitbang, perwakilan Dishub, perwakilan Kepala Satpol PP, Camat Parung Panjang, Forkopimcam Parung Panjang dan masyarakat setempat. ● gio